

TRANSMIGRASI DI KEPENGHULUAN LABUHAN TANGGA KECIL KECAMATAN BANGKO (1998-2017)

Asmawati*, Bunari, Asril

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Riau
Pekanbaru, Riau, Indonesia

asmawati3266@student.ac.id, bunari@lecture.unri.ac.id, asril@lecture.unri.ac.id

ABSTRACT

The Bangko sub-district area is one of the recipient areas of the transmigration program in Riau province since 1981. One of the areas that became the placement of transmigration communities in Bangko sub-district is the Labuhan Tangga Kecil village/village in 1998. This study aims to examine the background and input process of transmigration communities, the development of socio-economic life, obstacles faced by transmigration communities, and the socio-economic impacts of transmigration communities in Labuhan Tangga Kecil village, Bangko sub-district (1998-2017). The research method used is the historical research method (historical method) with four stages, namely heuristics, verification, interpretation and historiography. The results of the study indicate that transmigration in the Labuhan Tangga Kecil village is a general pattern of transmigration placed in stages from July to October 1998 with a total of 250 families. The socio-economic development of the transmigration community has increased significantly, especially after the expansion into a definitive village and the change in the pattern of rice farming to oil palm plantations. Despite facing various serious obstacles, the transmigration program in the Labuhan Tangga Kecil village continues to provide a positive socio-economic impact for the transmigration community.

Keyword: History, Transmigration, Social Economic

ABSTRAK

Wilayah kecamatan Bangko merupakan salah satu wilayah penerima program transmigrasi di provinsi Riau sejak tahun 1981. Salah satu wilayah yang menjadi penempatan masyarakat transmigrasi di kecamatan Bangko yaitu desa/Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil di tahun 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang dan proses masuknya masyarakat transmigrasi, perkembangan kehidupan sosial ekonomi, hambatan yang di hadapi masyarakat transmigrasi, serta dampak sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (metode historis) dengan empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, intepretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil merupakan transmigrasi pola umum yang di tempatkan secara bertahap dari Juli hingga Oktober 1998 dengan jumlah 250 kk. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi mengalami peningkatan signifikan terutama setelah terjadinya pemekaran menjadi desa definitif serta perubahan pola pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit. Meskipun menghadapi berbagai hambatan yang berat, program transmigrasi di kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil tetap memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat transmigrasi.

Kata Kunci: Sejarah, Transmigrasi, Sosial Ekonomi

PENDAHULUAN

Wilayah Republik Indonesia dengan populasi yang besar menghadapi tantangan distribusi penduduk yang tidak merata dan tidak seimbang dengan kapasitas daya dukung alam serta daya tampung lingkungan. Ketidakseimbangan ini berpotensi memicu konflik sosial dan degradasi lingkungan apabila tidak diatasi dengan pendekatan yang komprehensif. Ketidakmerataan persebaran penduduk tersebut mengakibatkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah yang telah maju cenderung mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, sementara daerah tertinggal semakin termarginalkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan pengaturan distribusi penduduk oleh pemerintah melalui implementasi program transmigrasi yang terencana dan berkelanjutan (Sasioba, J.B. 2018).

Penyelenggaraan transmigrasi sebagai komponen integral pembangunan nasional mencakup seluruh kegiatan persiapan pemukiman yang memenuhi standar layak huni, mendukung aktivitas ekonomi, dan memiliki potensi pengembangan (Wulandara, I. S., Hadara, A., Hak, P. 2022). Program Transmigrasi di Indonesia secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan, menciptakan keseimbangan penyebaran penduduk, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga manusia, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Esensi dari program transmigrasi tidak sekadar pada pemindahan penduduk, tetapi merupakan upaya terencana untuk mengembangkan wilayah dengan kepadatan tinggi menuju area dengan kepadatan rendah atau kawasan yang belum berkembang serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pemberian dukungan komprehensif berupa lahan pertanian dan pekarangan kepada masyarakat dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah (Septiyani, D. 2014).

Implementasi program transmigrasi di Indonesia dilaksanakan di berbagai pulau termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pulau Sumatera menjadi salah satu tujuan utama transmigrasi sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan karena kondisi geografis yang luas dan kepadatan penduduk yang relatif rendah di beberapa wilayahnya (Pradana, R. B. A. 2018). Berdasarkan data sensus tahun 2010, sebanyak 15,5 juta transmigran berada di wilayah Sumatera. (Sucahyo, N. 2018). Salah satu daerah penerima program transmigrasi di Sumatera adalah Provinsi Riau.

Provinsi Riau menerima program transmigrasi sejak sebelum implementasi program pembangunan lima tahun (Hamidy, A. M. 1984). Hingga tahun 2011, sebanyak 131.149 kepala keluarga atau setara dengan 540.578 individu telah ditempatkan di sebelas kabupaten/kota di Provinsi Riau yang tidak hanya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, tetapi juga dari penduduk lokal Riau sendiri (Sumirat, L. 2012).

Kecamatan Bangko merupakan salah satu wilayah penerima program transmigrasi di Provinsi Riau sejak tahun 1981 dengan beberapa desa penempatan termasuk Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil yang menerima program transmigrasi dengan jenis transmigrasi umum. Program transmigrasi yang terjadi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil ini dilaksanakan pada tahun 1998 dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi III Rokan Navigasi 8 (UPT. III Rokan N.8).

Pelaksanaan program transmigrasi di wilayah ini telah membawa perubahan signifikan dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Lahan usaha yang diberikan menjadi modal utama dalam meningkatkan taraf hidup transmigran yang awalnya dimanfaatkan untuk bertani padi serta tanaman pangan lainnya, namun seiring berjalannya waktu terjadi peralihan dari pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit. Peralihan petanian padi ke perkebunan kelapa sawit ini semakin mendorong terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat transmigrasi. Hal ini terlihat dari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Selain aspek ekonomi, program transmigrasi juga membawa perubahan dalam aspek sosial dengan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

Perkembangan wilayah yang pesat akibat program transmigrasi akhirnya berdampak pada perubahan status administratif. Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil mengalami pemekaran menjadi dua wilayah yaitu Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dan Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Wilayah transmigrasi saat ini secara administratif berada di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, yang mencerminkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan wilayah sebagai hasil dari program transmigrasi.

Sejak pemekaran wilayah tersebut Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru terus mengalami perkembangan tidak hanya perkembangan kehidupan sosial ekonomi tetapi juga terjadi perkembangan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang semakin menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari rangkaian latar belakang diatas, penulis melihat adanya pengaruh dari program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, ditambah belum adanya penelitian yang secara historis mengkaji mengenai transmigrasi di wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko ini menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai latar belakang, perkembangan sosial ekonomi, hambatan, serta dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dengan mengangkat judul penelitian “Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017)”.

METODE

Metode pada dasarnya adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan demikian, metode selalu berkaitan erat dengan langkah-langkah kerja, proses pelaksanaan, dan teknik-teknik yang tersusun secara sistematis dalam melakukan penelitian pada bidang ilmu tertentu. Tujuan penggunaan metode adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan (Pranoto, S. W. 2010).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah (metode historis). Metode sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (mengkritisi sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan rekonstruksi sejarah) (Putri, T., Eddy, I., & Soenaryo, F. 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Proses Masuknya Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017)

a. Latar Belakang Masuknya Masyarakat Transmigrasi

Program transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada era Orde Baru. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor mendasar yang saling berkaitan, baik dari aspek demografis, ekonomis, maupun pembangunan wilayah. Program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah terdapat beberapa kriteria masyarakat yang dapat mengikuti program transmigrasi. Marwiyah (60 Tahun) asal DKI Jakarta menyebutkan bahwa untuk dapat mengikuti transmigrasi haruslah masyarakat yang berdomisili di daerah Jawa yang dibuktikan dengan KTP dan KK, serta sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan surat nikah. Lebih lanjut Misbah Udin (50 Tahun) asal Jawa Tengah menyebutkan bahwa kriteria untuk mengikuti transmigrasi yaitu sudah berkeluarga, memiliki KTP, KK dan surat nikah serta telah mengikuti pelatihan persiapan transmigrasi kurang lebih satu bulan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pelatihan.

Meskipun program transmigrasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam

konteks ini, keputusan untuk bertransmigrasi tidak semata-mata didorong oleh kebijakan negara melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan harapan individual masyarakat. Wasih (65 Tahun) menyampaikan bahwa alasan terbesar masyarakat mengikuti transmigrasi didasari karena faktor ekonomi yang sulit di wilayah Jawa, hal ini ditandai dengan ketiadaan kepemilikan lahan maupun tempat tinggal, pekerjaan yang ada bersifat tidak tetap, hingga tingginya kepadatan penduduk yang membuat sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini kemudian menjadi latar belakang masyarakat mengikuti program transmigrasi dengan harapan dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, pekerjaan yang tetap dan masa depan yang lebih bagus untuk anak-anak mereka.

Berdasarkan pernyataan Tumiran (56 Tahun) menyebutkan bahwa penempatan lokasi untuk masyarakat transmigrasi ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Departemen Transmigrasi di wilayah asal mereka. Mereka hanya mengikuti arahan dari Departemen Transmigrasi mengenai lokasi penempatan yang telah ditetapkan dalam hal ini wilayah Riau menjadi tujuan penempatan Transmigrasi.

Implementasi program transmigrasi di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa pola yang penerapannya bervariasi di setiap daerah. Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, program transmigrasi menggunakan pola transmigrasi umum, yakni pola transmigrasi yang seluruh biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Edi Pranoto (50 Tahun) menyebutkan bahwa dalam transmigrasi umum setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan berupa rumah, lahan usaha seluas 2 hektare, bibit tanaman padi dan tanaman pangan lain, peralatan pertanian, serta kebutuhan pokok seperti sembako yang rutin diberikan selama dua tahun.

b. Proses Masuknya Masyarakat Transmigrasi

Proses masuknya masyarakat transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil berlangsung dalam proses yang sangat panjang dan terdapat perbedaan di beberapa wilayah asal. Dimana pada transmigran asal Jawa Timur dimulai dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai dari Departemen Transmigrasi dari rumah ke rumah mengenai program transmigrasi ini ke wilayah mereka. Setelah itu, masyarakat yang berniat untuk mengikuti transmigrasi diminta untuk menyiapkan berkas-berkas diantaranya KK, KTP dan surat nikah yang diserahkan ke pegawai transmigrasi. Kemudian masyarakat yang telah mendaftar tersebut, diharuskan untuk mengikuti pelatihan selama lebih kurang satu bulan di Yayasan Dharmais di wilayah Magetan, dimana dalam pelatihan ini diajarkan beragam materi maupun keterampilan guna mempersiapkan masyarakat transmigrasi yang mampu mandiri secara ekonomi. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, masyarakat transmigrasi diberikan sertifikat kelulusan sebagai salah satu syarat untuk dapat diberangkatkan ke wilayah transmigrasi. Keberangkatan dari wilayah Jawa Timur ke Labuhan Tangga Kecil menggunakan mobil Damri dengan waktu tempuh perjalanan selama satu minggu. Proses yang serupa seperti ini juga terjadi untuk angkatan transmigrasi dari wilayah Jawa Tengah.

Berbeda dengan transmigrasi asal DKI Jakarta, dimana proses mereka dimulai dari adanya pegawai pemerintahan desa yang mencari calon yang mau mengikuti transmigrasi. Dimana pegawai dari pemerintahan desa tersebut menyampaikan langsung jaminan yang akan didapatkan sebagai masyarakat transmigrasi seperti rumah, tanah serta kebutuhan hidup lainnya di lokasi transmigrasi. Selanjutnya masyarakat yang ingin mengikuti transmigrasi diminta untuk melakukan pendaftaran melalui kantor desa pada bulan April 1998. Tidak lama setelah pendaftaran tersebut selesai, diumumkan jadwal keberangkatan serta titik kumpul masyarakat transmigrasi untuk diberangkatkan secara bersama-sama menuju Departemen Sosial di Jakarta sebagai tempat penampungan sementara masyarakat transmigrasi. Akan tetapi dikarenakan adanya demonstrasi besar-besaran pada bulan Mei tahun 1998, membuat waktu tunggu yang cukup lama di tempat penampungan tersebut. Namun selama di penampungan tersebut, semua kebutuhan transmigran seperti makan dan keperluan sehari-hari tetap disediakan oleh pemerintah. Setelah situasi politik mulai kondusif pasca pelantikan Presiden B.J. Habibie barulah kemudian para transmigran ini di berangkatkan dari DKI Jakarta

menuju ke Pekanbaru menggunakan bus Sinar Jaya dengan waktu tempuh tiga hari. Tiba di Pekanbaru rombongan masyarakat transmigrasi melakukan transit selama satu hari di asrama transito, kemudian baru di berangkat kembali menuju Labuhan Tangga Kecil. Proses ini juga sama seperti angkatan transmigrasi asal Jawa Barat.

Angkatan transmigran pertama yang sampai ke wilayah Labuhan Tangga Kecil adalah angkatan transmigran asal Jawa Timur sebanyak 40 KK. Ketika masyarakat transmigrasi ini sampai di wilayah Labuhan Tangga Kecil, mereka diberhentikan di luar kawasan transmigrasi, barulah kemudian mereka berjalan kaki menuju kawasan transmigrasi melewati jalan setapak. Setelah sampai di lokasi transmigrasi, mereka dikumpulkan di kantor KUPT dan dilakukan pembagian undian nomor rumah serta lahan usaha I. Ketika undian nomor rumah dan lahan usaha I sudah didapatkan, masyarakat transmigrasi langsung mencari rumah-rumah mereka sendiri. Tidak berselang lama, angkatan transmigran lain juga sampai ke lokasi transmigrasi. Total keseluruhan angkatan transmigrasi tahun 1998 di Labuhan Tangga Kecil berjumlah 250 KK.

Gelombang kedatangan terakhir dalam penempatan transmigrasi di Labuhan Tangga Kecil berasal dari APPDT. APPDT (Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi) yaitu penduduk lokal atau asli yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pemukiman transmigrasi dan di ikutsertakan dalam program transmigrasi. Dimana masyarakat lokal yang ikut dalam transmigrasi ini ada sebanyak 50 KK.

Untuk melihat gelombang kedatangan keseluruhan transmigrasi tahun 1998 di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Penempatan UPT III Rokan N.8 Kecamatan Bangko Tahun 1998

No	Tanggal Penempatan	Daerah Asal	Jumlah		Jumlah		Ket
			KK	Jiwa	LK	PR	
1	04-07-1998	Jawa Timur	40	135	59	76	TU
2	05-07-1998	DKI Jakarta	40	142	68	74	TU
3	06-07-1998	Jawa Timur	21	87	43	44	TU
4	07-07-1998	Jawa Tengah	40	150	81	69	TU
5	18-07-1998	Jawa Barat	32	129	65	64	TU
6	21-07-1998	Jawa Tengah	27	95	55	40	TU
7	17-10-1998	APPDT	50	266	136	130	TU
Jumlah			250	1.004	507	497	

Sumber Data: Arsip Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru

Sebagai awal untuk memulai kehidupan masyarakat transmigrasi diberikan bantuan oleh pemerintah perkepala keluarga sesuai dengan ketentuan dalam transmigrasi umum. Wasirin (66 Tahun) menyebutkan bahwa bantuan yang didapatkan oleh masyarakat transmigrasi meliputi rumah ukuran 6m x 6m, lahan usaha seluas 2 hektare yakni 0,5 hektare lahan usaha I, 0,5 hektare lahan perkarangan, dan 1 hektare lahan usaha II, yang dibagi secara bertahap, yakni setelah lahan usaha I digunakan keseluruhan oleh masyarakat transmigrasi, barulah satu tahun setelahnya dibagikan lahan usaha II. Masyarakat transmigrasi juga diberikan bibit tanaman seperti padi, jagung, pisang, mangga serta bibit tanaman pangan lainnya. selain itu mereka juga mendapatkan bantuan baju tani, pupuk serta peralatan tani seperti cangkul, parang, dan gembor. Transmigran juga diberikan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak makan, kecap, ikan asin, garam, gula, kacang-kacang, serta minyak lampu sebagai bahan bakar penerangan di malam hari. Untuk jadup berupa kebutuhan pangan pada awalnya diberikan berupa nasi siap saji yang telah disiapkan oleh petugas transmigrasi. Jatah makan ini diberikan sebanyak tiga kali sehari selama satu minggu awal kedatangan.

2. Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017)

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil membawa perubahan nyata bagi kehidupan para transmigran yang ditempatkan di wilayah tersebut. Dalam perjalanan waktu dari tahun 1998 hingga 2017, masyarakat transmigrasi mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Perkembangan ini tidak terlepas dari proses adaptasi transmigran terhadap lingkungan baru serta upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat transmigrasi selama periode tersebut menggambarkan bagaimana mereka bertahan dan berkembang di lokasi penempatan transmigrasi.

Pada bulan-bulan awal sejak kedatangan transmigran, mereka disibukkan dengan proses pembukaan lahan perkarangan dan lahan usaha I yang telah diberikan oleh pemerintah. Proses pembukaan lahan ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Pembukaan lahan perkarangan dan lahan usaha I dikerjakan secara berkelompok dan bergotong royong oleh sesama transmigran. Dimana mereka membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan blok/kawasan transmigrasi. Pengerjaan lahan ini dilakukan secara bergantian hingga semuanya selesai. Proses pembukaan lahan yang berlangsung sedikit lama ini disebabkan karena adanya hambatan berupa banjir yang diterima oleh para transmigran saat membuka lahan.

Proses selanjutnya setelah pembukaan lahan perkarangan dan lahan usaha I selesai, masyarakat transmigrasi mulai menanam bibit-bibit yang telah diberikan oleh pemerintah mulai dari padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, cabe, waluh, kacang panjang, dan tanaman perkebunan seperti randu, kelapa, tebu serta tanaman buah-buahan seperti nangka, rambutan, jeruk, pisang, pepaya, mangga, nanas, dan alpokat. Diantara bibit-bibit tanaman tersebut, penanaman bibit tanaman padi dikerjakan oleh masyarakat transmigrasi secara berkelompok sama seperti pada pembukaan lahan. Namun pada satu tahun awal, panen padi tidak terlalu berhasil, hal ini disebabkan karena seringnya banjir yang terjadi di wilayah transmigrasi, kondisi ini juga kemudian membuat tidak sedikit masyarakat transmigrasi memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Setelah adanya perbaikan saluran parit barulah banjir di wilayah transmigrasi ini berkurang, sehingga masyarakat transmigrasi mulai bisa mendapatkan hasil panen padi mereka.

Pada tahun 2000 KUPPT kembali membagikan lahan usaha II kepada masyarakat transmigrasi. Pembagian lahan usaha II dilakukan oleh pihak KUPPT setelah semua lahan perkarangan dan lahan usaha I telah dibuka dan digunakan secara keseluruhan, barulah kemudian dibagikan kembali lahan usaha II dengan cara di undi. Pembukaan lahan usaha II ini juga kembali dibuka oleh sebagian besar masyarakat transmigrasi secara berkelompok hingga semua lahan usaha II terbuka. Adanya pembagian lahan usaha II ini juga kemudian memperbesar peluang hasil pertanian padi milik para masyarakat transmigrasi. Pada tahun ini masyarakat transmigrasi mulai mencari pekerjaan tambahan sambil menunggu hasil panen padi. Beberapa dari masyarakat transmigrasi ada yang bekerja sebagai tukang bangunan di kota Bagansiapiapi, mencari kayu hingga mencari ikan yang kemudian dijual ke masyarakat lokal sekitar, serta tidak sedikit juga dari masyarakat transmigrasi yang memelihara peternakan hewan. Kemandirian ekonomi ini mulai diupayakan oleh masyarakat transmigrasi setelah program jaminan hidup (jadup) dihentikan pada tahun kedua.

Perkembangan dalam lima tahun awal kedatangan transmigrasi menunjukkan peningkatan dalam usaha pertanian dan perkebunan, dimana produksi tanaman pangan terutama padi sudah mulai menghasilkan meskipun ada beberapa tanaman yang gagal berproduksi karena masalah banjir. Pada tahun 2002-2003, luas tanam padi mencapai 160-360 hektar dengan produksi 450-840 ton. Dari aspek pendidikan, sudah didirikan satu unit sekolah dasar yang awalnya masih berupa bangunan papan dengan jumlah murid mencapai 306 orang pada tahun 2002. Masyarakat transmigrasi juga mendapatkan pendidikan non formal melalui latihan keterampilan seperti usaha tani lengkap terpadu, usaha ternak, berkoperasi, dan

pelatihan untuk perangkat pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir. 2002-2003)

Dari aspek kesehatan, sudah tersedia satu unit puskesmas pembantu dengan satu tenaga perawat yang melayani berbagai jenis penyakit yang sering diderita masyarakat seperti saluran pencernaan, penyakit kulit, malaria, saluran pernapasan dan diare. Sementara untuk aspek keagamaan, mayoritas masyarakat transmigrasi beragama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 1.638 orang pada tahun 2002, kerukunan antar umat beragama berjalan dengan baik yang ditunjang dengan adanya 2 mushola dan 5 mesjid serta 4 orang rohaniawan (Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir. 2002-2003)

Pada tahun 2003, wilayah transmigrasi ditetapkan sebagai desa definitif dengan nama Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru dengan penghulu pertamanya bapak Sudarmawan. Penetapan status ini mendorong perkembangan yang signifikan terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana, dimana berbagai fasilitas yang awalnya berupa bangunan semi permanen dari papan seperti gedung sekolah, puskesmas pembantu, dan rumah ibadah secara bertahap direnovasi menjadi bangunan permanen. Pada tahun 2004 juga sudah masuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bisa digunakan oleh masyarakat transmigrasi.

Perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2005, ketika mulai berdatangan pendatang baru dari luar kawasan transmigrasi yang membeli tanah dari masyarakat transmigrasi untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Melihat potensi ekonomi dari perkebunan kelapa sawit yang ditanam para pendatang tersebut, beberapa masyarakat transmigran mulai tertarik dan mencoba menanam kelapa sawit secara bertahap di lahan mereka meskipun awalnya masih dalam skala kecil. Pada tahun 2011, tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat transmigrasi mulai memasuki masa panen dan memberikan pendapatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan tanaman padi atau tanaman pangan lainnya. Dengan pendapatan yang meningkat dari kelapa sawit, masyarakat transmigran mulai mampu menambah aset-aset mereka seperti membeli motor, memperbesar rumah, dan menambah kepemilikan lahan.

Melihat keberhasilan ekonomi dari perkebunan kelapa sawit, peralihan lahan dari tanaman padi ke kelapa sawit terus berlanjut hingga tahun 2017, dimana seluruh lahan transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru telah beralih sepenuhnya ke perkebunan kelapa sawit. Peralihan ini menandai perubahan besar dalam pola ekonomi dan mata pencaharian masyarakat transmigran dari yang semula berbasis pertanian pangan campuran menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dari aspek kependudukan, jumlah penduduk di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 1998 hingga 2017. Pada tahun 1998 jumlah penduduk transmigrasi tercatat sebanyak 1.004 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.638 jiwa pada tahun 2002 dan 1.735 jiwa pada tahun 2003. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk mencapai 2.250 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk tercatat 2.171 jiwa, kemudian menurun menjadi 2.117 jiwa pada tahun 2016, dan kembali naik menjadi 2.171 jiwa pada tahun 2017. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di wilayah transmigrasi ini mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat selama periode penelitian, hal ini menunjukkan bahwa wilayah transmigrasi ini terus mengalami perkembangan.

3. Hambatan yang di hadapi Masyarakat Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017)

Program transmigrasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan strategis dalam pembangunan nasional. Tujuan dari program ini tidak hanya sekadar mengembangkan pola persebaran penduduk yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk mengangkat derajat dan kesejahteraan para transmigran agar dapat memperoleh penghidupan yang lebih layak di tempat yang baru dibandingkan dengan kondisi kehidupan mereka di daerah asal. Melalui program ini, pemerintah berupaya membuka

peluang bagi masyarakat untuk memulai kehidupan baru dengan harapan dan masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, pelaksanaan program transmigrasi di lapangan sering kali tidak berjalan semulus rencana yang telah disusun. Realitas yang dihadapi para transmigran ketika tiba di lokasi penempatan kerap kali berbeda jauh dari gambaran yang mereka terima sebelumnya. Di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko, masyarakat transmigrasi yang datang pada tahun 1998 menghadapi serangkaian hambatan yang cukup berat. Hambatan-hambatan ini menyangkut aspek lingkungan maupun infrastruktur, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari transmigran.

Misbah Udin (50 Tahun) menyebutkan bahwa hambatan pertama yang dihadapi oleh masyarakat transmigrasi adalah kondisi wilayah transmigrasi yang jauh dari ekspektasi. Masyarakat transmigrasi mengira bahwa lingkungan transmigrasi yang akan mereka tempatkan sudah layak ditempati dan digunakan sepenuhnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan setelah mereka tiba di lokasi transmigrasi, mereka mendapatkan kondisi lingkungan yang cukup berat, mulai dari lahan perkarangan yang ada di dekat rumah mereka yang sudah dipenuhi dengan rumput-rumput yang cukup tinggi, sehingga menyulitkan bagi mereka saat mencari dimana posisi rumah mereka, karena rumput-rumput yang ada di lahan perkarangan sudah menutupi rumah mereka hingga kebagian atap. Akibatnya banyak dari masyarakat transmigrasi baru menemukan rumahnya setelah berhari-hari. Kondisi ini disebabkan karena adanya keterlambatan masuknya transmigran ke lokasi transmigrasi. Selain lahan perkarangan, lahan usaha I dan II milik transmigran juga masih berupa hutan yang belum sepenuhnya dibuka oleh pemerintah, hal ini kemudian mengharuskan mereka untuk membukanya sendiri. Kondisi-kondisi tersebut menjadi hambatan yang sangat berarti bagi masyarakat transmigrasi, terutama pada masa awal penempatan yang seharusnya menjadi periode penyesuaian dan pembangunan kehidupan baru.

Hambatan lain yang dihadapi masyarakat transmigrasi adalah permasalahan banjir yang sangat menghambat kehidupan mereka. Edi Pranoto (50 Tahun) menyampaikan bahwa lingkungan geografis wilayah transmigrasi yang berada di dataran rendah dengan jenis tanah gambut serta belum adanya sistem parit yang memadai menyebabkan wilayah ini sangat rawan banjir setiap kali hujan turun. Hambatan banjir ini mempengaruhi beberapa aspek kehidupan transmigran, pertama dalam kegiatan pertanian dimana mereka kesulitan mengolah lahan karena banyaknya genangan air saat hendak mencangkul atau membabat. Kedua dalam pola tanam karena tidak semua jenis tanaman dapat bertahan saat banjir, bahkan tanaman yang sudah siap panen dapat mati akibat terendam air. Ketiga dalam mobilitas karena tanah gambut menjadi sangat lembek saat terendam hingga membuat kaki terbenam setinggi lutut.

Kondisi banjir yang parah ini terjadi hampir 5 tahun semenjak kedatangan transmigrasi. Barulah kemudian di tahun 2003 mulai adanya perbaikan saluran parit yang mengurangi intensitas banjir di wilayah transmigrasi ini, walaupun sampai saat ini wilayah transmigrasi terkadang masih mengalami banjir namun tidak berselang lama seperti tahun-tahun awal kedatangan.

Selain persoalan banjir, hambatan lain yang tidak kalah krusial adalah kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Tumiran (56 Tahun) menuturkan bahwa wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil yang menjadi lokasi transmigrasi terletak di kawasan tanah gambut yang berwarna hitam. Karakteristik tanah gambut ini berdampak langsung pada kualitas air tanah yang tersedia. Dimana air yang bersumber dari tanah gambut berwarna kemerah-merahan. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan kondisi air di Jawa yang umumnya jernih dan bersih sehingga langsung dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kondisi ini menambah rasa frustrasi masyarakat transmigrasi karena air dari tanah gambut inilah yang terpaksa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci pakaian.

Hambatan lain yang dihadapi oleh masyarakat transmigrasi adalah kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Edi Pranoto (50 Tahun) menyampaikan bahwa pada masa awal kedatangan tahun 1998, lokasi transmigrasi belum memiliki fasilitas

kesehatan. Transmigran yang sakit hanya bisa ditangani sementara oleh personel Kodim yang ditempatkan di lokasi. Pada tahun 1999, barulah kemudian pemerintah membangun puskesmas di lokasi transmigrasi. Namun mantri kesehatan yang bertugas tidak tinggal di lokasi, melainkan pulang pergi dari Bagansiapiapi. Hal ini kemudian menimbulkan masalah karena ketika hujan, mantri sering tidak bisa datang akibat kondisi jalan yang buruk. Mantri kadang menginap tiga hari di lokasi, tetapi setelah pulang bisa tidak datang lagi selama dua hari atau lebih. Saat mantri tidak ada dan ada masyarakat yang sakit, personel Kodim kembali harus menangani.

Kondisi pelayanan kesehatan pada masa awal ini semakin terasa berat khususnya untuk kasus persalinan. Pada saat itu belum ada dukun bayi atau tenaga kesehatan khusus yang menangani persalinan di lokasi transmigrasi. Sehingga ketika ada kasus persalinan harus dibawa ke rumah sakit yang ada di wilayah Bagansiapiapi dengan menggunakan sepeda motor milik personel Kodim. Fasilitas kesehatan baru kemudian membaik setelah pemekaran wilayah transmigrasi menjadi kepenghuluan defenitif. Setelah pemekaran desa ini hingga tahun 2017 pemerintah telah menempatkan tenaga kesehatan yaitu bidan dan perawat. Namun demikian hingga tahun 2017 sampe sekarang untuk permasalahan kesehatan yang lebih serius tetap perlu di rujuk ke rumah sakit umum daerah di Bagansiapiapi.

Berbagai hambatan tersebut kemudian membuat banyak dari masyarakat transmigrasi memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi terutama di lima tahun awal sejak kedatangan, yakni sekitar 50% dari total masyarakat transmigrasi memilih untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Masyarakat transmigrasi yang pergi meninggalkan lokasi ini ada yang balik lagi ke daerah asal mereka di Jawa, kemudian ada juga yang pindah ke desa-desa sekitar. Lahan yang ditinggalkan para transmigran ini ada yang dibiarkan begitu saja, namun sebagian besar dijual untuk modal kembali ke Jawa atau membeli tanah di daerah lain.

Masyarakat yang meninggalkan lokasi transmigrasi tidak sepenuhnya mendapatkan sanksi berat. Sutikno (60 Tahun) menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa tidak adanya tanggungjawab pemerintah untuk membiayai kepulangan mereka ke daerah asal. Untuk mendapatkan biaya kepulangan tersebut, sebagian besar transmigran menjual tanah yang telah mereka terima dengan harga mencapai sekitar 2 juta rupiah. Hasil penjualan tanah ini kemudian digunakan sebagai modal untuk biaya perjalanan kembali ke Jawa bagi yang ingin pulang ke daerah asal, sementara bagi mereka yang tidak kembali ke Jawa, hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk membeli tanah di desa-desa lain di luar lokasi transmigrasi.

4. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko (1998-2017)

a. Periode I (1998-2002)

Dampak kehidupan sosial masyarakat transmigrasi pada periode ini terlihat dalam aktivitas gotong royong maupun tolong menolong yang tinggi antar masyarakat transmigrasi. Berdasarkan penuturan dari Edi Pranoto (50 Tahun) masyarakat transmigrasi memiliki sifat kegotongroyongan dan kerjasama yang baik, hal ini terjadi hampir di banyak pekerjaan masyarakat seperti dalam pembukaan lahan yang dilakukan secara berkelompok dan saling bergantian kemudian juga terlihat dalam aktivitas pembangunan sarana desa seperti pembuatan pos kamling, membuat jalan, hingga perbaikan parit yang dilakukan secara bersama. Selain dalam aspek kegotong royongan, dampak transmigrasi juga ditandai dengan terbentuknya kelompok RT dan kelompok tani. Sutikno (60 Tahun) menyebutkan bahwasanya kelompok tani yang ada di wilayah transmigrasi dibentuk satu bulan sejak kedatangan transmigrasi di tahun 1998. Pembentukan kelompok tani ini diarahkan langsung oleh kepala unit pemukiman transmigrasi (KUPT) dengan mengumpulkan masyarakat transmigrasi untuk kemudian didata dan dibentuk kelompok rukun tetangga (RT) serta kelompok tani. Di mana kelompok RT yang dibentuk pada saat itu terdiri dari 10 RT serta 10 kelompok tani. Kesepuluh kelompok tani tersebut memiliki total anggota sebanyak 250 orang dengan total luas lahan yang dikelola mencapai 500 hektar.

Dampak sosial lain dalam periode ini ditandai dengan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 1999 berupa berdirinya Sekolah Dasar di wilayah transmigrasi. Sekolah Dasar ini mulai beroperasi pada 11 Juli 1999 dengan bangunan awalnya yang masih berupa papan. Selain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga turut dibangun oleh pemerintah berupa satu unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan satu tenaga perawat. Dampak transmigrasi terus berlanjut di mana dari tahun 2000 hingga tahun 2002 mulai terbentuk kelompok-kelompok kesenian dan olahraga. Kelompok kesenian yang terbentuk berupa kelompok rebana dan kuda lumping sementara untuk kelompok olahraga yaitu kelompok bola voli sebanyak dua kelompok.

Selain dampak sosial, dampak ekonomi juga terjadi pada periode ini. Dari aspek pekerjaan, program transmigrasi memberikan perubahan yang cukup baik bagi kehidupan transmigran. Tumiran (56 Tahun) menyampaikan bahwa program transmigrasi ini telah memberikan mereka pekerjaan yang layak, di mana masyarakat transmigrasi ini dapat bekerja sebagai petani dengan lahan milik mereka sendiri. Selain bertani sebagian masyarakat transmigrasi juga ada yang bekerja di sektor bangunan, mencari kayu maupun mencari ikan sambil menunggu hasil panen padi. Dampak ekonomi selanjutnya juga terlihat dari kemampuan transmigran untuk memiliki usaha peternakan. Usaha peternakan yang diusahakan transmigran meliputi ternak ayam, angsa, bebek, kambing, kerbau dan sapi. Dalam aspek penghasilan, transmigrasi memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terbukti dari banyaknya transmigran yang memperoleh penghasilan dari hasil panen pertanian maupun komunitas lain yang telah mereka buka di lahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Edi Pranoto (50 Tahun) menyebutkan bahwa pada periode ini penghasilan masyarakat berkisar antara 150-300 ribu per bulan. Walaupun masih dalam 5 tahun kedatangan, masyarakat transmigrasi sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup meskipun bukan dalam jumlah yang besar.

b. Periode II (2003-2007)

Pada periode ini adanya perkembangan jumlah penduduk masyarakat transmigrasi telah membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan administratif wilayah Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Perkembangan administratif ini telah menjadikan desa transmigrasi sebagai desa defenitif, dimana awalnya desa transmigrasi ini berada dibawah Kepenghuluan labuhan Tangga Kecil kemudian berubah status menjadi desa defenitif pada tahun 2003 dengan nama Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. Perkembangan administratif ini turut membawa dampak dalam bidang sosial di wilayah transmigrasi. Dampak dalam bidang sosial ini terlihat dari mulai terbentuknya organisasi-organisasi sosial pada unit pemukiman transmigrasi sebagai wadah kegiatan sosial di masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dilokasi dan menampung partisipasi dalam pembangunan untuk kemajuan kepenghuluan. Adapun organisasi sosial yang terbentuk dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Organisasi Sosial di Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru Tahun 2003

No	Organisasi Sosial	Jumlah Kelompok	Ket
1	Pramuka	1	-
2	Karang Taruna	1	-
3	Keagamaan	3	-
4	Kematian	1	-
5	Hansip	1	-
6	Kelompok Tani	10	

7	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1	-
8	LMD (Lembaga Mediasi Desa)	1	-
9	LMDK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)	1	-

Sumber: Data Monografi Unit Pemukiman Transmigrasi Tahun 2003

Dampak transmigrasi pada periode kedua ini juga terlihat dari perkembangan sarana dan prasarana di wilayah transmigrasi. Wasirin (66 Tahun) menuturkan bahwasanya pada tahun 2004 terjadi perkembangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dimana gedung Sekolah Dasar dan Pustu yang awalnya berupa bangunan papan diganti dengan bangunan permanen. Selain itu, pada periode ini juga sudah berdiri Taman Kanak-kanak (TK) dengan nama TK Tunas Harapan yang mulai beroperasi pada 20 Desember 2006.

Dampak selanjutnya di bidang ekonomi yaitu mulai bervariasinya mata pencaharian dan komoditas pertanian masyarakat. Berdasarkan penuturan dari Ngadio (58 Tahun) pada periode ini pekerjaan masyarakat transmigrasi semakin beragam. Dimana pekerjaan masyarakat tidak hanya terfokus pada sektor pertanian maupun peternakan seperti pada periode pertama, tetapi mulai berkembang ke sektor-sektor industri dan jasa seperti pedagang tukang kayu, tukang batu, tukang pangkas, tukang jalut, bengkel sepeda, bengkel motor, warung-warung, serta industri rumah tangga seperti pembuat tahu, tempe dan kerupuk. Selain itu komoditas pertanian masyarakat juga tidak hanya berfokus pada padi akan tetapi mulai masyarakat mulai sedikit beralih menanam sawit di sebagian lahan mereka. Kemudian dalam aspek penghasilan pada periode ini juga terjadi peningkatan, dimana penghasilan masyarakat transmigrasi berkisar 400-500 ribu dalam sebulan.

c. Periode III (2008-2012)

Dampak transmigrasi pada periode ini hampir sama dengan periode sebelumnya, dimana dalam bidang sosial menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan tidak adanya perubahan ataupun penambahan organisasi sosial kemasyarakatan. Selain organisasi sosial kemasyarakatan, tingkat kegotong royongan masyarakat juga masih menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap kegiatan kegotong royongan yang dilakukan. Dampak transmigrasi pada periode ketiga dalam bidang sarana dan prasarana menunjukkan dampak yang lebih baik, hal ini ditandai dengan masuknya listrik PLN ke wilayah transmigrasi dan menggantikan listrik PLTD. Masuknya listrik PLN ini membawa dampak yang positif bagi masyarakat transmigrasi karena lebih murah dibandingkan dengan listrik PLTD.

Dampak transmigrasi pada periode ketiga di bidang ekonomi secara umum masih menunjukkan kesinambungan dengan periode-periode sebelumnya. Struktur mata pencaharian transmigran pada periode ini masih relatif sama dengan periode kedua, dimana mayoritas masyarakat mengandalkan sektor pertanian padi dan kelapa sawit, serta mata pencaharian pendukung lain seperti pedagang peternakan, industri rumah tangga dan jasa. Selain mata pencaharian tersebut di periode ini juga ada beberapa dari masyarakat transmigrasi yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Namun yang berbeda pada periode ini adalah terjadi peningkatan penghasilan masyarakat dari hasil produksi tanaman sawit yang sudah mulai menghasilkan.

Tumiran (56 Tahun) menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kelapa sawit yang di tanam oleh sebagian transmigran sudah mulai menghasilkan buah dalam jumlah yang besar. Selain itu pada periode ini juga terjadi peningkatan penghasilan masyarakat transmigrasi yang berkisar 800 ribu hingga 2 Juta perbulan. Penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat transmigrasi tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memungkinkan mereka untuk membeli berbagai aset seperti sepeda motor, televisi, kulkas, kursi, dan perabotan rumah tangga lainnya. Selain itu, transmigran juga mampu melakukan

perbaikan dan perluasan rumah mereka. Dampak yang paling berarti adalah kemampuan masyarakat transmigrasi untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi.

d. Periode IV (2013-2017)

Dampak sosial dalam hal organisasi sosial masyarakat yang berbeda pada periode ini adalah mulai tidak beroperasinya kelompok tani pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena lahan-lahan usaha milik masyarakat transmigrasi yang sebelumnya digunakan untuk pertanian padi telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit, sehingga kelompok tani yang sebelumnya ada sudah tidak lagi beroperasi. Dampak transmigrasi dalam bidang infrastruktur pada periode keempat ini juga terlihat dari penambahan bangunan mushola sebanyak satu unit pada tahun 2014. Kemudian juga dilakukan perbaikan sarana dan prasarana desa seperti kantor desa, pukesmas pembantu, gedung sekolah SD maupun TK, serta perbaikan jalan yang diperkeras.

Dampak selanjutnya di bidang ekonomi pada periode keempat jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat cenderung sama dengan periode sebelumnya dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Akan tetapi pada tahun 2017 masyarakat sudah mulai beralih ke perkebunan kelapa sawit sehingga tidak lagi bertumpu pada pertanian padi. Dimana pada tahun 2017 ini, lahan usaha masyarakat yang awalnya digunakan untuk pertanian padi sudah berganti dengan perkebunan kelapa sawit.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Latar belakang masyarakat mengikuti transmigrasi didasari karena faktor ekonomi yang sulit di daerah Jawa, hal ini ditandai dengan ketiadaan kepemilikan lahan maupun tempat tinggal, pekerjaan yang ada bersifat tidak tetap, hingga tingginya kepadatan penduduk yang membuat sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini kemudian menjadi latar belakang masyarakat mengikuti program transmigrasi dengan harapan dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, pekerjaan yang tetap dan masa depan yang lebih bagus untuk anak-anak mereka. Penempatan transmigrasi dilaksanakan secara bertahap dari Juli hingga Oktober 1998 dengan total 250 KK yang terdiri dari 200 KK asal Jawa dan 50 KK masyarakat lokal dengan pola transmigrasi umum. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat transmigrasi mengalami peningkatan signifikan terutama setelah terjadinya pemekaran menjadi desa definitif serta perubahan pola pertanian padi ke perkebunan kelapa sawit. Meskipun menghadapi berbagai hambatan yang berat, program transmigrasi di kepenghuluhan Labuhan Tangga Kecil tetap memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi masyarakat transmigrasi.

2. Saran

a) Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan survei dan persiapan lokasi transmigrasi secara lebih menyeluruh sebelum penempatan transmigran, termasuk pembukaan lahan perkarangan dan lahan usaha, serta pembangunan sistem drainase/parit yang memadai untuk menghindari permasalahan banjir. Pemerintah juga perlu melakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan harus diprioritaskan sejak awal untuk memudahkan adaptasi dan meningkatkan produktivitas transmigran.

b) Bagi Masyarakat transmigrasi

Masyarakat transmigrasi perlu mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang telah menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengatasi berbagai hambatan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada periode 1998-2017 dengan fokus pada aspek sosial ekonomi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan periode waktu yang lebih

panjang untuk melihat perkembangan jangka panjang masyarakat transmigrasi. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek-aspek lain yang belum tersentuh dalam penelitian ini, seperti aspek budaya, pola interaksi dengan masyarakat lokal, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. (2014). Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Per Kecamatan Dan Kelurahan /Kepenghuluan Berdasarkan Jumlah Penduduk, Kelompok Umur, Agama, Pendidikan, Perkawinan Dan Pekerjaan Keadaan 31 Desember 2014.
- Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir. (2002). *Monografi Unit Pemukiman Transmigrasi U.P.T III/Rokan Navigasi 8*. Bagansiapiapi: Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
- Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hilir. (2003). *Monografi Unit Pemukiman Transmigrasi U.P.T III/Rokan Navigasi 8*. Bagansiapiapi: Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
- Hamidy., A. M. (1984). *Masalah Sosial Budaya Dan Teknologi Transmigran Lokal di daerah Riau*. Pekanbaru: BAPPEDA Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru. (2017). *Data Monografi Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2017*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Utama.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik*. Gresik: Penerbit JSI Press.

Jurnal

- Pradana, R. B. A. (2018). Evaluasi Program Transmigrasi (Studi Kasus Program Transmigrasi Di Distrik Kurik, Muting Dan Semangga Kabupaten Merauke). *Doctoral dissertation*. Universitas Hasanuddin.
- Putri, T., Eddy, I., & Soenaryo, F. (2022). Kerukunan Antarumat Beragama di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2005-2021. *Pustaka: Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 22(2), 120-125.
- Sasioba, J.B. (2018). Perkembangan Masyarakat Transmigrasi di Desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 1983-2015. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 1(1).
- Septiyani, D. 2014. Para Transmigran di Desa Rasau Jaya I Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Tahun 1971-1979. *Journal of Indonesian History*, 3(1).
- Wulandara, I. S., Hadara, A., Hak, P. (2022). Masyarakat transmigrasi di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan (2010-2020). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 7(3), 142-155.

Peraturan

- Pemerintah Indonesia. (1972). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988.

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. (2003). Pembentukan Kepenghuluan Persiapan Sungai Sialang Hulu, Kepenghuluan Persiapan Labuhan Tangga Baru, Kepenghuluan Persiapan Bantaian Baru dan Kepenghuluan Persiapan Bantaian Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003 Seri D Nomor 06.

Internet

Sucahyo, N. (2018). Transmigrasi: Program yang Mengubah Wajah Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/transmigrasi-program-yang-mengubah-wajah-indonesia/4568597.html>. Diakses pada 13 Juni 2025 pukul 21.58.

Sumirat, Lismar. (2012). Siabu Kampung Transmigrasi Pertama di Riau, <https://riaupos.jawapos.com/feature/2253375474/siabu-kampung-transmigrasi-pertama-di-riau>. Diakses pada 8 April, 2025 pukul 18.19.

Wawancara

Edi Pranoto, diwawancarai oleh penulis, 27 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Marwiyah, diwawancarai oleh penulis, 27 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Misbah Udin, diwawancarai penulis 26 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Ngadio, diwawancarai oleh penulis, 26 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Sumardi, diwawancarai oleh penulis, 3 Juli 2025, Penghulu Labuhan Tangga Baru.

Supardi, diwawancarai oleh penulis, 10 Juli 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Sutikno, diwawancarai oleh penulis, 3 Juli 2025, Mantan Petugas Transmigrasi Tahun 1998.

Tumiran, diwawancarai oleh penulis, 30 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.

Wasirin, diwawancarai oleh penulis, 30 Juni 2025, Masyarakat Transmigrasi.